

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota
- Baskoro, Bambang Dwi, 2006, *Hukum Eksekusi Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Council of Europe, 2013, *impact study on civil forfeiture*, Council of Europe, Belgrade.
- Effendi, Sofia, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kholis, Efi Laila, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Depok
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- Mahfud, Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2021, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (asset recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, kencana, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2021, *Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga,
- Prakoso, Djoko, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 3

- Stensses, guy, 2003, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Press, Cambridge.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan.
- Theodore S. Greenberg et al, 2009, *Stolen Asset recovery-Good Praticice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/NCB Asset Forfeiture)*, The World Bank, Washington.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang
- Yanuar, Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Korupsi*, PT Alumni, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2041 Tahun 2014).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1601 Tahun 2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022).

C. Pidato

O.S Hiariej, Eddy, 2012, Pidana dalam Perspektif: Pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi, *Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, tanggal 30 Januari 2012.

D. Jurnal

Ferdinan, Ardi, "Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2021

Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 80.

Manangin, Muhamad Syaifullah, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia", *jurnal ilmu hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020, hlm 181.

Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas*, Vol 4, No 1, 2013

Nelson, Febby Mutiara, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?" *Simbur Cahaya*, 2020

Priyono, Bayi, "Strategi Hukum Pidana terhadap Recovery Asset hasil Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, 2013

Salmi, Akhiar, "Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini dan Masa Datang", *Jurnal hukum dan pembangunan*, 2018

E. Disertasi

Herimulyanto, Agustinus, 2018, Sita Aset Berbasis Nilai dan Pembuktian dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Tesis

Asnawi, 2016, Penerapan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Terhadap Aset hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia, *tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Kampus, Yogyakarta

Natalina, Mia, 2020, Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2014 Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

Peranginangin, Aprianta Budi, 2020, Penyitaan Aset Milik Tersangka Berkaitan Dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Jakarta

G. Skripsi

Harahap, Akmal Armunda, 2021, The Urgency To Regulate Deferred Prosecution Agreement (Dpa) In Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yuniasningrum, Armita Tri, 2022, Pidana Tambahan Uang Pengganti Terhadap Terpidana Korupsi yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

H. Internet

CNN Indonesia, “Pekerja Indosat M2 Minta Jokowi Turun Tangan Soal gaji Hingga PHK”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211214155907-92-733965/pekerja-indosat-m2-minta-jokowi-turun-tangan-soal-gaji-hingga-phk>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Detik Finance, “Indosat M2 Dibubarkan, Nasib Ratusan Karyawan Memilukan”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5855290/indosat-m2-dibubarkan-nasib-ratusan-karyawannya-memilukan>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023

Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf>

Indonesian Corruption Watch, Tren Vonis Korupsi 2020, <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020>

Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>, 2022, diakses pada 19 September 2022

Wikitionary, “terintervensi”, <https://id.wiktionary.org/wiki/terintervensi>, diakses 16 Februari 2023.